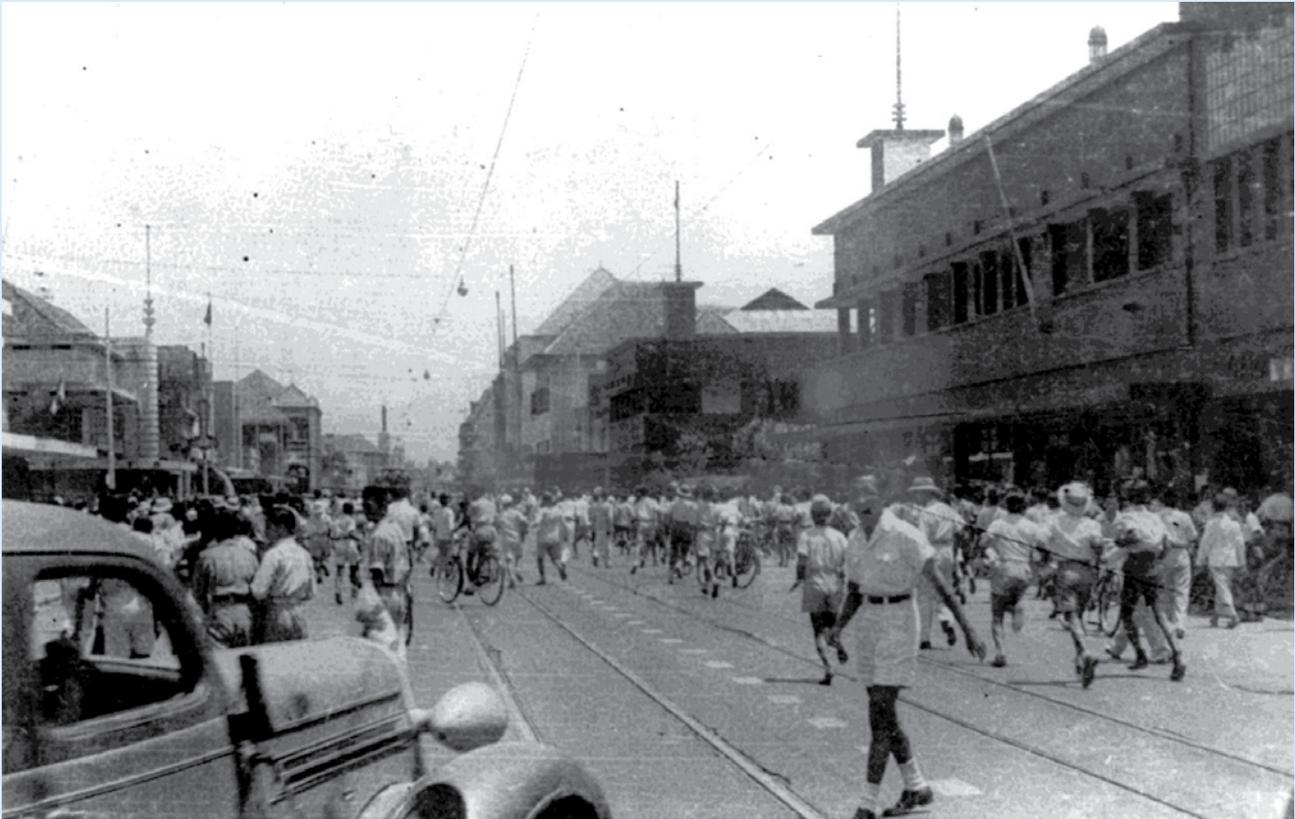


NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, ARSIP DAN REVOLUSI MENTAL



Peristiwa heroik para pemuda Surabaya menentang tentara Belanda di sekitar Hotel Yamato Surabaya (sekarang Hotel Gajah Mada). Peristiwa heroik Insiden Surabaya ini kemudian diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan 10 Nopember 1945

Sumber: ANRI: Kempen 531304 FG1-6

Masih teringat dalam memori betapa besar keberanian arek-arek Surabaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tangan Sekutu pada 10 November 1945. Peristiwa ini diawali dengan Kedatangan tentara sekutu dibawah kepemimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby pada 25 Oktober 1945. Pembebasan terhadap para perwira Sekutu dan pegawai RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners of War and Internees*) serta ultimatum bagi orang Indonesia yang bersenjata untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri, memicu perlawanan dari arek-arek Surabaya. Sehingga terjadi

pertempuran Surabaya yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan.

Peristiwa Pertempuran Surabaya merupakan salah satu contoh perjuangan dan pengorbanan arek-arek Surabaya yang dapat dikategorikan sebagai sikap kepahlawanan. Masih ada beberapa pertempuran seperti Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area dimana semua menunjukkan sikap kepahlawanan dari kelompok masyarakat yang ikut bertempur. Semua memberikan pengorbanan besar baik materi maupun imateri

bahkan nyawa, mereka sebagai pahlawan. Pahlawan yang berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih. Kategori perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan pertempuran fisik, namun juga melalui perjuangan diplomasi. Dengan demikian mereka yang ikut dalam perjuangan diplomasi juga dikategorikan sebagai pahlawan.

Eksistensi sebuah negara tidak terlepas dari peran pahlawan yang ada di dalam negara yang bersangkutan. Peran dari perbuatan yang dilakukan oleh para pahlawan, maka sebuah

LAPORAN UTAMA

negara menjadi merdeka, maju, dan bahkan “mendunia”. Mereka yang telah berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan baik melalui perang fisik maupun diplomasi pada umumnya memperoleh gelar sebagai Pahlawan Nasional. Hingga saat ini, ada sekitar 159 orang yang tercatat sebagai pahlawan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan nasional merupakan gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Melihat dari pengertian tersebut, artinya seorang pahlawan adalah orang yang telah berkorban dalam pertempuran merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta orang yang berhasil memberi keharuman nama bangsanya dalam kancah internasional dengan prestasi dan karyanya. Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan redaksi Media Kearsipan Nasional, menurut Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras, Pahlawan adalah orang yang melampaui panggilan diri dan tugasnya. Artinya seorang pahlawan adalah orang yang melakukan sesuatu yang lebih besar dari tugas dan kemampuannya sebagai bentuk pengabdian bagi bangsanya. Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Kepala ANRI Mustari Irawan

“
Hal yang lebih penting adalah nilai-nilai kepahlawanan yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua
”

Mustari Irawan, mengatakan bahwa “Pahlawan adalah orang yang berjuang demi kepentingan masyarakat, negara dan bangsa dan mengabaikan kepentingan pribadi. Pengabdian yang dilakukan oleh para pahlawan didasari oleh niat yang ikhlas untuk berkorban yang disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sekali dan kecintaan

akan tanah air”.

Pahlawan bukan hanya orang yang gugur dalam medan perang, seseorang yang menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia juga bisa disebut sebagai pahlawan. Indonesia sudah tidak terlibat dalam pertempuran bersenjata, negara ini tetap membutuhkan pahlawan dalam berbagai bidang yang dapat membawa keharuman bangsa ini. Mereka yang telah berprestasi dalam bidangnya adalah pahlawan bagi bangsa ini. Dalam bidang jurnalistik ada Tirta Adisuryo, dalam bidang seni ada Ismail Marzuki, dan dalam bidang kedokteran ada Prof. Dr. Suharso. Pada masa kini, mereka yang berprestasi dan membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional memperoleh penghargaan baik dari negara maupun pihak swasta yang ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah Yulianti Laksmi Parani, yang pernah memperoleh

penghargaan karena dedikasinya dalam bidang seni tari. Ia memperoleh tanda kehormatan Satyalencana Kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014. Dalam wawancara dengan Media Kearsipan Nasional, Ibu lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 1970 ini mengatakan bahwa "Pemberian gelar pahlawan merupakan usaha pemerintah untuk menghargai mereka yang di masa lalu telah membantu bangsa dalam menemukan identitasnya sebagai bangsa", ujarnya. Ibu yang pernah menjadi salah seorang pejabat struktural di ANRI ini berharap agar selanjutnya ANRI dapat menampilkan penerbitan arsip orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan bangsa.

Melihat pengertian pahlawan dari beberapa perspektif, ada beberapa nilai-nilai yang dapat dirumuskan sebagai sikap dari seorang pahlawan, yaitu rela berkorban, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, ikhlas, dan cinta tanah air. Nilai-nilai kepahlawanan tersebut menjadi hal yang dapat kita pelajari dan implementasikan dalam kehidupan saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Hartono Laras " Akan tetapi, di balik itu semua, hal yang lebih penting adalah nilai-nilai kepahlawanan yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai rela berkorban, tanpa pamrih, percaya pada kemampuan sendiri, dan pantang mundur, dimana nilai-nilai tersebut harus direvitalisasi dan diaktualisasikansertadijadikansebagai nilai-nilai *spirit* dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa". Dalam hal ini menurutnya kemampuan untuk percaya pada diri sendiri, kerelaan untuk berkorban dan tanpa pamrih,



Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia Hartono Laras

pantang menyerah, dan perbuatan yang didasari oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri seorang pahlawan. Nilai-nilai ini harus didayagunakan, ditanamkan, dan dilestarikan mengingat besarnya negeri dengan penduduk yang beragam. Nilai-nilai yang terkandung dalam diri pahlawan sangat penting untuk diimplementasikan dalam karakter bangsa Indonesia saat ini. Selain tempaan arus globalisasi yang begitu besar, bisa dikatakan krisis moral juga sedang terjadi di negara ini. Dalam media massa sering kita lihat sikap kelompok masyarakat bahkan oknum pejabat yang tidak mencerminkan karakter bangsa ini. Mulai dari tawuran antarwarga, perdebatan dan persaingan yang tidak sehat dari para politisi negeri ini bahkan kasus korupsi yang menimpa oknum wakil rakyat negara ini. Sikap negatif tersebut tentu membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dapat dikatakan, apabila para pahlawan kita yang telah gugur

berada dalam masa kini, betapa sedihnya melihat keributan dan perpecahan yang terjadi, padahal mereka sudah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga yaitu kehidupan.

Apakah kita hanya berdiam diri saja melihat kenyataan ini? Pemerintah Republik Indonesia sudah mulai melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mulai digalakkan program *Character Building*. Setiap instansi pemerintah diminta untuk mendukung program tersebut sesuai bidangnya masing-masing. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga ikut ambil bagian dalam program tersebut dengan menampilkan kembali karakter bangsa sebagaimana terekam dalam arsip yang tersimpan di ANRI. Menyikapi hal ini, Kepala ANRI berpendapat bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang dapat menjadi karakter bangsa meliputi nilai keikhlasan, kejujuran, kecintaan terhadap tanah air, nasionalisme,

LAPORAN UTAMA

kegigihan, keberanian, dan keuletan. Keberhasilan dalam membangun kembali nilai-nilai kepahlawanan ke dalam karakter masyarakat Indonesia saat ini akan memberi harapan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Setelah pergantian pimpinan, upaya perbaikan karakter bangsa juga terus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, hanya saja istilahnya berganti menjadi revolusi mental. Mengenai wacana revolusi mental, Presiden Joko Widodo pernah menulisnya dalam surat kabar Kompas edisi 10 Mei 2014, Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Revolusi mental diharapkan dapat membawa perubahan besar yang lebih baik bagi negara ini, terutama untuk membawa Indonesia kepada negara yang merdeka, adil, makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. Menurut Kepala ANRI Mustari Irawan, revolusi didefinisikan sebagai perubahan dalam waktu yang singkat, sedangkan mental didefinisikan sebagai karakter atau watak manusia. Ada watak yang merupakan pembawaan, imitasi, sugesti, ataupun identifikasi. Untuk dapat merubah watak ke arah yang lebih baik dibutuhkan proses yang memakan waktu dan dibutuhkan sarana. Terkait dengan trisakti pembangunan manusia dengan kepribadian yang berkebudayaan seperti yang dikonsepsikan oleh Presiden Joko Widodo adalah karakter-karakter bangsa Indonesia misalnya rasa nasionalisme yang telah memudar. Dalam media Kompas 10 Mei 2014, Presiden Joko Widodo menulis,



Yulianti Laksmi Parani

“Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, “Indonesia yang berdaulat secara politik”, “Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan “Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum dalam penerapan nilai-nilai kepahlawanan yang relevan dengan pembinaan karakter bangsa atau yang lebih dikenal dengan revolusi mental, kata Hartono Laras.

Penganugerahan gelar pahlawan diberikan langsung oleh Presiden RI yang biasanya dilakukan menjelang peringatan hari Pahlawan pada 10 November setiap tahun. Pengangkatan sebagai pahlawan dalam rangka penghormatan, penghargaan yang diberikan negara atas jasa seseorang. Gelar pahlawan tidak diberikan begitu saja kepada seseorang, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memperolehnya. Syarat umum untuk memperoleh gelar pahlawan di antaranya Warga Negara Indonesia

atau seseorang yang berjuang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memiliki integritas moral dan keteladanan; berjasa terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara serta tidak pernah dipidana penjara. Selain syarat umum, masih ada syarat khusus untuk bisa memperoleh gelar pahlawan di antaranya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; serta memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang

tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Dalam pengajuan gelar ini, dibutuhkan beberapa dokumen terkait calon pahlawan yang bersangkutan seperti daftar riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan, uraian perjuangan, biografi, daftar dan bukti tanda kehormatan yang pernah diterima, catatan pandangan/pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang pahlawan nasional yang bersangkutan, serta foto dokumentasi yang menjadi perjuangan calon pahlawan nasional yang bersangkutan. Dengan kata lain, dokumen/ arsip sangat berperan untuk pengajuan seseorang memperoleh gelar pahlawan. Sebab tanpa bukti perjuangan seseorang dalam bentuk dokumen, sulit rasanya untuk memperoleh gelar pahlawan. Arsip-arsip yang terhimpun tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan rapat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Daerah (TP2GD) dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP). Dalam hal ini, TP2GD akan memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati/walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar. Sedangkan TP2GP bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian gelar.

Dalam usulan pemberian gelar pahlawan, ANRI menjadi salah satu anggota TP2GP. Dalam hal ini Kepala ANRI berharap agar perspektif kearsipan yang menjadikan arsip sebagai bukti dapat diselenggarakan terkait dengan proses pengajuan gelar pahlawan nasional. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional berperan dalam mendokumentasikan peristiwa

“Keharuman nama sebuah bangsa merupakan salah satu hal yang dipersembahkan seorang pahlawan kepada bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya”

sejarah dan nilai-nilai kepahlawanan sebagaimana terekam dalam arsip pahlawan. Terkait dengan khasanah arsip pahlawan yang disimpan di ANRI, menurut Kepala ANRI yang dilantik pada bulan Desember tahun 2013, “Arsip-arsip yang terkait dengan kepahlawanan masih bersifat menyebar dan masih berasal dari perspektif penjajah. Belum ada khazanah yang secara spesifik yang memberikan gambaran tentang pahlawan secara individu. Oleh karena itu untuk meniyasati kekurangan tersebut dilakukan wawancara sejarah lisan yang bekerja sama dengan sejarawan dari beberapa perguruan tinggi, contoh: wawancara dengan Bung Hatta, LN Palar, Leimena, dan Abdul Halim. Dengan adanya program sejarah lisan diharapkan dapat melengkapi beberapa khazanah terkait kepahlawanan secara individu yang belum terekam di dalam arsip. Terkait dengan akuisisi arsip pahlawan, Mustari Irawan mengatakan bahwa “untuk kedepannya dapat dilakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial mengingat dalam proses pengajuan

pahlawan, arsip berperan sebagai bukti dalam pengajuan seseorang untuk menjadi pahlawan. Selain Kemensos, tentu ada beberapa instansi pemerintah yang terkait dalam konteks pahlawan masa kini oleh karena itu ANRI dinilai perlu untuk mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi tersebut, salah satu contohnya adalah perguruan tinggi. Dengan adanya UU No. 43 Tahun 2009 dan PP No. 28 Tahun 2009 dinilai sudah mampu untuk mengakomodir dalam proses penyelamatan arsip-arsip pahlawan. Sekarang yang diperlukan adalah aksi kongkrit. Terlebih lagi pihak ANRI sedang menyusun inpres terkait akuisisi atau penyelamatan arsip-arsip yang tidak hanya berorientasi di akhir kegiatan pemerintahan akan tetapi juga di awal kegiatan pemerintahan”.

Keharuman nama sebuah bangsa merupakan salah satu hal yang dipersembahkan seorang pahlawan kepada bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Pahlawanku Idolaku. (Santi)